



**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2020**



**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2017 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2017 ini dapat tersusun, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016– 2021 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2016– 2021.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2017 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/421.013/2018  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja OPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung

kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2019. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 memuat Program/kegiatan tahun 2019, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2020.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
24. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/324/KEP/35.017.013/2018 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2019;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja-OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 (n-2) Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

##### **A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 98%.
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - j. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan :
    - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui Kegiatan :
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari -Hari Tertentu target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan melalui Kegiatan :
    - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui Kegiatan :
    - a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - b. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
    - c. Pengendalian Keamanan Lingkungan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui Kegiatan :

- a. Peningkatan kerjasama dengan Aparat Kemanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - c. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah (Piket) target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - d. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui Kegiatan :
- Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d tahun 2018

| No       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                 | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2018 (Tahun berjalan) |                     |
|----------|---|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   |   |  |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian  | Tingkat Capaian (%) |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8 (7/6)               | 9   | 10=9   | 11 (10/4)           |
|          | <b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |  |   |   |                               |                       |   |  |                     |
| <b>I</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran</b>                           | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                     | <b>20%</b>   | <b>20%</b>          |
| 1        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)    | 10 Rekening  | 12 Bulan  | 2 Rekening  | 2 Rekening                    | 2 Rekening            | 2 Rekening                                      | 2 Rekening   | 20%                 |
| 2        | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan   | Jumlah Pejabat Pengelola administrasi Keuangan (OB)                                     | 560 OB   | 12 Bulan  | 112 OB  | 112 OB                        | 112 OB                | 112 OB  | 112 OB   | 20%                 |
| 3        | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja   | Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan penggandaan suku cadang yang disediakan (unit) | 105 Unit   | 12 Bulan  | 21 Unit   | 21 Unit                       | 21 Unit               | 21 Unit   | 21 Unit  | 20%                 |
| 4        | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)  | 190 Bulan  | 12 Bulan  | 38 Jenis  | 38 Jenis                      | 38 Jenis              | 38 Jenis  | 38 Jenis   | 20%                 |
| 5        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)   | 15 Jenis   | 12 Bulan  | 3 Jenis   | 3 Jenis                       | 3 Jenis               | 3 Jenis   | 3 Jenis  | 20%                 |
| 6        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik   | 55 Jenis   | 12 Bulan  | 11 Jenis  | 11 Jenis                      | 11 Jenis              | 11 Jenis  | 11 Jenis   | 20%                 |
| 7.       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan yang disediakan (Jenis)          | 15 Bulan   | 12 Bulan  | 3 Jenis   | 3 Jenis                       | 3 Jenis               | 3 Jenis   | 3 Jenis  | 20%                 |



| No         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                    | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2018(Tahun berjalan) |                     |
|------------|--|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|            |  |  |  |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian   | Tingkat Capaian (%) |
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8 (7/6)               | 9   | 10 (9)  | 11 (10/4)           |
| 2.         | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                   | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama I dan semester II (Buku) | 5 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                     | 1 Dokumen             | 1 Dokumen                                       | 0   | 0                   |
| 3.         | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                | Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir (Buku)                               | 5 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                     | 1 Dokumen             | 1 Dokumen                                       | 0   | 0                   |
| <b>V.</b>  | <b>PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>       | <b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>                       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>   | <b>20% *</b>        |
| 1.         | Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah         | Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah                    | 15 Giat  | 3 Kegiatan  | 3 Kegiatan  | 3 Kegiatan                    | 20%                   | 72 Kegiatan                                     | 24 Kegiatan   | 20% *               |
| 2.         | Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah            | Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah                       | 350 Giat   | 174 Kegiatan  | 174 Kegiatan  | 174 Kegiatan                  | 20%                   | 158 Kegiatan                                    | 52 Kegiatan   | 20% *               |
| 3.         | Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah         | Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah                    | 870 Kegiatan                                       | 153 Kegiatan  | 153 Kegiatan  | 765 Kegiatan                  | 20%                   | 39 Kegiatan                                     | 12 Kegiatan   | 20% *               |
| <b>VI.</b> | <b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>   | <b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>                     | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>20%</b>            | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>   | <b>20% *</b>        |
| 1.         | Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban      | Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban                 | 450 Kegiatan                                       | 90 Kegiatan   | 90 Kegiatan   | 90 Kegiatan                   | 20%                   | 62 Kegiatan                                     | 8 Kegiatan  | 20% *               |

| No          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                 | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2018(Tahun berjalan) |                     |
|-------------|---|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|             |   |   |  |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian   | Tingkat Capaian (%) |
| 1           | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8 (7/6)               | 9   | 10 (9)  | 11 (10/4)           |
| 2.          | Pengamanan Aset   | Jumlah Pengamanan Aset  | 1.825 Hari   | 365 Hari  | 365 Hari  | 365 Hari                      | 365 Hari              | 365 Hari  | 120 Hari  | 20% *               |
| 3           | Ketentraman dan Ketertiban  | Jumlah Ketentraman dan Ketertiban                                       | 400 Kegiatan                                       | 80 Kegiatan   | 80 Kegiatan   | 80 Kegiatan                   | 80 Kegiatan           | 80 Kegiatan                                     | 400 Kegiatan  | 20% *               |
| <b>VII.</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  | <b>Persentase petugas linmas yang mendapat pelatihan</b>                | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>   | <b>20% *</b>        |
| 1.          | Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)                            | Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas                                     | 545 Kegiatan                                       | 56 Kegiatan   | 56 Kegiatan   | 56 Kegiatan                   | 56 Kegiatan           | 56 Kegiatan                                     | 56 Kegiatan   | 20% *               |
| 2.          | Pembentukan Pengamanan Swakarsa   | Jumlah Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat             | 20 Kegiatan  | -   | 4 Kegiatan  | 4 Kegiatan                    | 4 Kegiatan            | 4 Kegiatan                                      | 4 Kegiatan  | 20% *               |
| 3.          | Pembinaan Kelompok Masyarakat   | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat                           | 5 Kegiatan   | -   | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan                    | 1 Kegiatan            | 1 Kegiatan                                      | 1 Kegiatan  | 20% *               |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>                    | <b>Persentase penanganan kejadian kebakaran</b>                         | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                     | <b>20%</b>  | <b>20% *</b>        |
| 1           | Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran  | Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran     | 100%   | 0   | 100%  | 100%                          | 100%                  | 100%  | 20%   | 20% *               |
| 2           | Penggulangan Kebakaran  | Jumlah Penggulangan Kebakaran   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                          | 100%                  | 100%  | 20%   | 20% *               |
| 3           | Pendataan daerah RawanKebakaran dan Pemeliharaan Saranandan Prasarana Pemadam Kebakaran | Jumlah Pendataan daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar | 100%   | 0   | 100%  | 100%                          | 100%                  | 100%  | 20%   | 20% *               |

| No        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 |                               |                       | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d 2018 (Tahun berjalan) |                     |
|-----------|---|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|           |   |   |  |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian  | Tingkat Capaian (%) |
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8 (7/6)               | 9   | 10 (9)   | 11 (10/4)           |
| <b>IX</b> | <b>PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>   | <b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu Tidak dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>  | <b>20% *</b>        |
| 1         | Kegiatan Pengumpulan Inforamsi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran | Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya (Salah Personalisas), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran  | 860 Kegiatan                                       | 164 Kegiatan  | 164 Kegiatan  | 164 Kegiatan                  | 20%                   | 164 Kegiatan                                    | 164 Kegiatan   | 20% *               |



Dari tabel diatas (Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang), diketahui bahwa pada perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2018 (kolom 10 dan 11\*) pada dasarnya Program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan pada 12 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Nomor 188.4/668/KEP/35.07.126/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, hanya saja perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d Tahun 2018 (Kolom 10 & 11\*) kurang diakumulasi /dihitung keseluruhan dalam periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021, hal ini disebabkan karena pada Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (kolom 5) yang merupakan tahun awal Periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa perbedaan/penyesuaian baik nomenklatur program dan kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir. Bahwasannya pada tahun 2016 secara keseluruhan rata-rata program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 11 November 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang Nomor : 188.4/00009/KEP/35.07.126/2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.**

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah kegiatan :
  - a. Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah;
  - b. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  - c. Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah.
2. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban , dengan kegiatan :
  - a. Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Pengamanan Aset;
  - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Perlindungan Masyarakat melalui Kegiatan :
  - a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Pembentukan Pengamanan Swakarsa;
  - c. Pembinaan Kelompok Masyarakat.
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - a. Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2018



| No | Indikator   | SPM/Standar Nasional   | IKK | Target Renstra PD Tahun ke |             |             |             | Realisasi Capaian |             |             |             | Catatan Analisis |
|----|---|--|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|    |   |  |     | 2017                       | 2018        | 2019        | 2020        | 2017              | 2018        | 2019        | 2020        |                  |
|    | Program : <b>Program Pemeliharaan dan Ketertiban</b>  |  |     |                            |             |             |             |                   |             |             |             |                  |
|    | Kegiatan : 1 Kegiatan Ketertiban dan Ketertiban Umum  |  |     | 60 Kegiatan                | 60 Kegiatan | 60 Kegiatan | 60 Kegiatan | 60 Kegiatan       | 60 Kegiatan | 60 Kegiatan | 60 Kegiatan |                  |
| 3  | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)  | Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota<br><br>Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota       | -   | 0,9                        | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 0,9               | 0,9         | 0,9         | 0,9         |                  |
|    | Program : <b>Program Perlindungan Masyarakat</b>  |  |     |                            |             |             |             |                   |             |             |             |                  |
|    | Kegiatan : 1 Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat                                      |  |     |                            |             |             |             |                   |             |             |             |                  |
|    | 2 Pembentukan Pengamanan Swakarsa   |  |     |                            |             |             |             |                   |             |             |             |                  |
|    | 3 Pembinaan Kelompok Masyarakat   |  |     |                            |             |             |             |                   |             |             |             |                  |
| 4  | <b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</b>  | <b>Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran yang Terjadi</b><br><br><b>Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran yang ditangani</b> |     | 100%                       | 100%        | 100%        | 100%        | 100%              | 100%        | 100%        | 100%        | 100%             |
|    | Program : <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>                      |  |     |                            |             |             |             |                   |             |             |             |                  |
|    | Kegiatan : 1 Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran   |  |     | 16 Kegiatan                | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan       | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan      |
|    | 2 Penanggulangan Kebakaran  |  |     | 30 Kegiatan                | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan       | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan      |
|    | 3 Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran |  |     | 24 Kegiatan                | 24 Kegiatan | 24 Kegiatan | 24 Kegiatan | 24 Kegiatan       | 24 Kegiatan | 24 Kegiatan | 24 Kegiatan | 24 Kegiatan      |

Catatan:

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan Renja OPD 2018, maka :

- tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2019
- tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2018
- tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2017
- tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2016

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.**

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Malang adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan(Luasan Wilayah);
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapkan Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.**

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Malang tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2018, program indikatif di tahun 2019 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2019 adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 8 program yang terdiri dari 33 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Malang :

Tabel 2.3  
Review Terhadap RKPD Tahun 2019 Kabupaten Malang

| No       | RKPD   |                  |  |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan   |                  |  |                |                          | Catatan Penting |
|----------|--|------------------|--|----------------|--------------------------|--|------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
|          | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| <b>I</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |                  | <b>Persentase Tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>                        | <b>20%</b>     | <b>2.563.048.000</b>     | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |                  | <b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>                              | <b>20%</b>     | <b>293.740.000</b>       |                 |
| 1.       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kantor Satpol PP | Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 Bulan       | 4.440.000                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kantor Satpol PP | Jumlah penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 Bulan       | 4.440.000                |                 |
| 2.       | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan                            | Kantor Satpol    | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)                                  | 12 Bulan       | 2.333.508.000            | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan                            | Kantor Satpol PP | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)                                  | 12 Bulan       | 85.600.000               |                 |
| 3        | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | Kantor Satpol PP | Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan       | 12 Bulan       | 12.000.000               | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | Kantor Satpol PP | Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan       | 12 Bulan       | 12.400.000               |                 |
| 4        | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Kantor Satpol PP | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)                                     | 12 Bulan       | 25.600.000               | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Kantor Satpol PP | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)                                     | 12 Bulan       | 25.600.000               |                 |
| 5        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kantor Satpol PP | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)  | 12 Bulan       | 20.900.000               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kantor Satpol PP | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)  | 12 Bulan       | 20.500.000               |                 |
| 6        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kantor Satpol PP | Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)                  | 12 Bulan       | 6.200.000                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kantor Satpol PP | Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)                  | 12 Bulan       | 7.200.000                |                 |

| No        | RKPD   |                  |   |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan                                   |                  |   |                |                          | Catatan Penting |
|-----------|--|------------------|---|----------------|--------------------------|--|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
|           | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| 7         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Kantor Satpol PP | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan (Jenis               | 12 Bulan       | 7.200.000                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Kantor Satpol PP | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan (Jenis               | 12 Bulan       | 7.200.000                |                 |
| 8         | Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Kantor Satpol PP | Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)            | 12 Bulan       | 46.000.000               | Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Kantor Satpol PP | Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)            | 12 Bulan       | 46.000.000               |                 |
| 9         | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah      | Kantor Satpol PP | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)                                | 12 Bulan       | 53.600.000               | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah      | Kantor Satpol PP | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)                                | 12 Bulan       | 31.200.000               |                 |
| 10        | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah    | Kantor Satpol PP | Jumlah penugasan dinas dalam daerah   | 12 Bulan       | 53.600.000               | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah    | Kantor Satpol PP | Jumlah pegawai memenuhi penugasan Dinas Dalam Daerah  | 12 Bulan       | 53.600.000               |                 |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>            |                  | <b>Persentase saranan prasarana yang berfungsi dengan baik</b>                              | <b>20%</b>     | <b>129.849.500</b>       |  |                  | <b>Persentase saranan prasarana yang berfungsi dengan baik</b>                              |                | <b>775.012.500</b>       |                 |
| 1         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | Kantor Satpol PP | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)                                  | 1 Tahun        | 20.949.500               | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor          | Kantor Satpol PP | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)                                  | 22 Unit        | 20.949.500               |                 |
| 2         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor          | Kantor Satpol PP | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit) | 1 Kali         | 108.900.000              | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | Kantor Satpol PP | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit) | 7 Unit         | 54.063.000               |                 |
| 3         | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                    | Kantor Satpol PP | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan (Unit)                       |                | 0                        | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                    | Kantor Satpol PP | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan (Unit)                       | 6 Unit         | 700.000.000              |                 |



| No  | RKPD  |                  |   |                 |                          | Hasil Analisis Kebutuhan  |                  |   |                 |                          | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|---|-----------------|--------------------------|---|------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan  | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target Capaian  | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| III | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                |                  | <b>Persentase pemenuhan disiplin aparatur</b>   | <b>20%</b>      | <b>72.360.000</b>        | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                |                  | <b>Persentase pemenuhan disiplin aparatur</b>   | <b>20%</b>      | <b>97.100.000</b>        |                 |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                              | Kantor Satpol PP | Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)  | 1 kali kegiatan | 55.200.000               | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                              | Kantor Satpol PP | Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)  | 1 kali kegiatan | 72.600.000               |                 |
| 2   | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu                               | Kantor Satpol PP | Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)   | 100 OB          | 17.160.000               | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu                               | Kantor Satpol PP | Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)   | 100 OB          | 24.500.000               |                 |
| IV  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                  | <b>Persentase Terwujutnya Capaian Laporan Kinerja</b>                                       | <b>20%</b>      | <b>10.752.000</b>        | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                  | <b>Persentase Terwujutnya Capaian Laporan Kinerja</b>                                       | <b>20%</b>      | <b>17.675.200</b>        |                 |
| 1   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD      | Kantor Satpol PP | Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku) | 1 Dokumen       | 3.584.000                | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD      | Kantor Satpol PP | Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku) |                 | 7.070.000                |                 |

| No        | RKPD   |                  |   |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan                                     |                  |   |                |                          | Catatan Penting |
|-----------|--|------------------|---|----------------|--------------------------|--|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
|           | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| 2         | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                       | Kantor Satpol PP | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)       | 1 Dokumen      | 3.584.000                | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                       | Kantor Satpol PP | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)       | 1 Dokumen      | 5.302.600                |                 |
| 3         | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                    | Kantor Satpol PP | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)                            | 1 Dokumen      | 3.584.000                | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                    | Kantor Satpol PP | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)                            | 1 Dokumen      | 5.302.600                |                 |
| <b>V</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    |                  | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b> |                | <b>0</b>                 | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    |                  | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b> | <b>20%</b>     | <b>171.000.000</b>       |                 |
|           | Pendidikan dan Pelatihan Formal                              |                  | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)                         |                | 0                        | Pendidikan dan Pelatihan Formal                              | Kantor Satpol PP | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)                         | 11 Orang       | 171.000.000              |                 |
| <b>VI</b> | <b>Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</b> |                  | <b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>                    | <b>20%</b>     | <b>882.395.800</b>       | <b>Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</b> |                  | <b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>                    | <b>20%</b>     | <b>283.400.000</b>       |                 |
| 1         | Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah    | 33 Kec.          | Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah                 | 72 Giat        | 347.511.800              | Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah    | 33 Kecamatan     | Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah                 | 96 Giat        | 11.300.000               |                 |
| 2         | Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah       | 33 Kec.          | Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah                    | 158 Giat       | 313.258.000              | Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah       | 33 Kecamatan     | Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah                    | 107 Giat       | 25.100.000               |                 |

| No         | RKPD  |  |  |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan                                    |  |  |                |                          | Catatan Penting |
|------------|---|--|--|----------------|--------------------------|---|--|--|----------------|--------------------------|-----------------|
|            | Program/Kegiatan  | Lokasi   | Indikator kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan  | Lokasi   | Indikator kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| 2          | Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah   | 33 Kec.  | Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah            | 39 Giat        | 221.626.000              | Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah   | 33 Kec.  | Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah            | 50 Giat        | 247.000.000              |                 |
| <b>VII</b> | <b>Program Pemeliharaan dan Ketertiban</b>                  |  | <b>Persentase Pemeliharaan dan Ketertiban</b>                      | <b>20%</b>     | <b>752.600.000</b>       | <b>Program Pemeliharaan dan Ketertiban</b>                  | 33 Kec.  | <b>Persentase Pemeliharaan dan Ketertiban</b>                      | <b>20%</b>     | <b>1.230.983.300</b>     |                 |
| 1          | Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban | 33 Kec.  | Jumlah Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban | 48 Giat        | 204.700.000              | Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban | 33 Kec.  | Jumlah Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketertiban dan Ketertiban | 48 Giat        | 225.000.00               |                 |
| 2          | Kegiatan Pengamanan Aset                                    | Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Bupati/Waki 1 Bupati | Jumlah Pengamanan Aset   | 365 hari       | 300.000.000              | Kegiatan Pengamanan Aset                                    | Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Bupati/Waki 1 Bupati | Jumlah Pengamanan Aset   | 365 hari       | 832.913.300              |                 |
| 3          | Kegiatan Ketertiban dan Ketertiban Umum                     | 33 Kec.  | Jumlah Patroli dalam rangka Ketertiban Umum                        | 46 Giat        | 247.900.000              | Kegiatan Ketertiban dan Ketertiban Umum                     | 33 Kec.  | Jumlah Patroli dalam rangka Ketertiban Umum                        | 46 Giat        | 173.070.000              |                 |

| No   | RKPD   |         |  |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan   |              |  |                |                          | Catatan Penting |
|------|--|---------|--|----------------|--------------------------|--|--------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
|      | Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi       | Indikator kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| VIII | <b>Program Perlindungan Masyarakat</b>                               | 33 Kec. | <b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>             | 20%            | <b>1.580.200.000</b>     | <b>Program Perlindungan Masyarakat</b>                               | 33 Kec.      | <b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>             | 20%            | <b>784.489.000</b>       |                 |
| 1    | Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat                             | 33 Kec. | Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat             | 22 Giat        | 1.331.200.000            | Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat                             | 33 Kec.      | Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat             | 22 Giat        | 660.873.000              |                 |
| 2    | Pembentukan Pengamanan Swakarsa                                      | 33 Kec. | Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | 13 Giat        | 112.000.000              | Pembentukan Pengamanan Swakarsa                                      | 33 Kec.      | Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | 13 Giat        | 55.602.000               |                 |
| 3    | Pembinaan Kelompok Masyarakat  | 33 Kec. | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat                        | 5 Giat         | 137.000.000              | Pembinaan Kelompok Masyarakat  | 33 Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat                        | 5 Giat         | 27.075.000               |                 |
| VIII | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b> |         | <b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>          | <b>20%</b>     | <b>551.336.000</b>       | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b> |              | <b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>          | <b>20%</b>     | <b>770.160.000</b>       |                 |

| No        | RKPD  |         |  |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan                                |         |  |                |                          | Catatan Penting |
|-----------|---|---------|--|----------------|--------------------------|---|---------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
|           | Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
| 1         | Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran                   | 33 Kec. | Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran  | 4 kali         | 27.880.000               | Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran | 33 Kec. | Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran  | 4 kali         | 262.066.000              |                 |
| 2         | Kegiatan Penanggulangan Kebakaran   | 33 Kec. | Jumlah Penanggulangan Kebakaran  | -              | 297.750.000              | Kegiatan Penanggulangan Kebakaran                       | 33 Kec. | Jumlah Penanggulangan Kebakaran  | -              | 147.818.000              |                 |
| 3         | Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar | 33 Kec. | Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar  | 12 kali        | 225.706.000              |   | 33 Kec. | Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar  | 12 kali        | 360.276.000              |                 |
| <b>IX</b> | <b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>                     | 33 Kec  | Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati | 100%           | 500.000.000              | <b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>   | 33 Kec  | Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati | 100%           | 500.000.000              |                 |

| No            | RKPD   |         |   |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan   |         |   |                |                          | Catatan Penting |
|---------------|--|---------|---|----------------|--------------------------|--|---------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
|               | Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan dana (Rp. 000) |                 |
|               |  |         | Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran  |                |                          |  |         | Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran  |                |                          |                 |
| 1             | Kegiatan Pengumpulan Informasi tentang adanya peredaran rokok yang dilekati pitacukai palsu /tidak dilekati pita cukai | 33 Kec. | Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran | 172 Giat       | 500.000.000              | Kegiatan Pengumpulan Informasi tentang adanya peredaran rokok yang dilekati pitacukai palsu /tidak dilekati pita cukai | 33 Kec. | Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran | 172 Giat       | 248.228.000              |                 |
| <b>Jumlah</b> |  |         |   |                | <b>6.160.145.500</b>     |  |         |   |                | <b>4.671.788.000</b>     |                 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pembahasan Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tidak terdapat usulan atau nihil.

Tabel 2.4  
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

| No        | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Catatan |
|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|---------|
|           |                  |        |                   |        |         |
| N I H I L |                  |        |                   |        |         |
|           |                  |        |                   |        |         |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN MALANG**

**1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan Operasional bersama dinas Sosial dalam rangka penanganan anak jalanan (anjali), gelandangan dan pengemis (Gepeng) dan wanita tuna susila (WTS) dan kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat (pelatihan terhadap Linmas Kecamatan) tetapi dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten masih mengalami kendala yaitu masih minimnya Linmas Perempuan yang ada di Kecamatan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat kerja daerah yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai OPD yang bertugas membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala



Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja harus mendukung prioritas pembangunan nasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan pelayanan pada 2 (dua) cakupan, yaitu :

1. Perlindungan Masyarakat; dan
2. Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

## **1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka mendukung **Misi I : “ Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supermasi hukum”**, maka tujuan pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah;
2. Meningkatkan pengendalian penggunaan cukai ilegal;
3. Memantapkan pola koordinasi dan kerjasama antar aparat keamanan dan masyarakat;
4. Mengoptimalkan peran masyarakat dibidang keamanan lingkungan;
5. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam;
6. Kesiagaan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
7. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran.

Sedangkan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah yang berlaku;
2. Berkurangnya penggunaan cukai ilegal;
3. Terwujudnya Pokja koordinasi dan kerjasama yang mantab dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat;
5. Tertanganinya pelaksanaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dalam meningkatkan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka mendukung Kabupaten Malang yang aman dan tertib di tahun 2019 mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
  - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
  - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
  - Kegiatan Pengadaan Pakaian Harian Khusus Hari – Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhirtahun.
5. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah kegiatan :
  - a. Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah;
  - b. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  - c. Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah.

6. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban , dengan kegiatan :
  - a. Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Pengamanan Aset;
  - c. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Program Perlindungan Masyarakat melalui Kegiatan :
  - a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Pembentukan Pengamanan Swakarsa;
  - c. Pembinaan Kelompok Masyarakat.
8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - a. Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
9. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
  - a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau.

Dari uraian program dan kegiatan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang diatas selama ini hanya beberapa kegiatan saja yang mengarah pada Pengarustamaan Gender, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang kedepan ingin di setiap kecamatan memiliki jumlah Linmas Perempuan yang sama dengan jumlah Linmas laki-laki yang ada saat ini, dan disetiap Program dan Kegiatan mengaju pada Pengarustamaan Gender sehingga mendorong peningkatan pembangunan Pemerintah Kabupaten dalam kualitas sumber daya manusia sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Development Goals, Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra OPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sehubungan dengan uraian diatas maka Rencana Kerja dan Pendanaan dapat kami simpulkan pada tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dibawah ini

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Programdan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

| Kode |    |    |   |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana tahun 2019 |                        |                |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                | KET |
|------|----|----|---|----|----|--|---|--------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|
|      |    |    |   |    |    |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Pagu Indikatif |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 |    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |                    |                        |                |             |                 |                                   |                |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)  | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 4.440.000      | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 5.600.000      |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan                            | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)                                   | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 85.600.000     | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 94.160.000     |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit) | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 12.400.000     | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 12.600.000     |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)                                      | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 25.600.000     | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 26.000.000     |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)   | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 20.500.000     | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 20.900.000     |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)                   | Kantor Satpol      | 12 Bulan               | 7.200.000      | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 7.600.000      |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)          | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 7.200.000      | APBD        |                 | 1 Paket                           | 7.600.000      |     |

| Kode |    |    |   |       |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana tahun 2019 |                        |                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                    | KET |
|------|----|----|---|-------|----|--|---|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----|
|      |    |    |   |       |    |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Pagu Indikatif     |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01    | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)            | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 46.000.000         | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 46.400.000         |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01    | 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah        | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)                                | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 31.200.000         | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 31.600.000         |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 01    | 19 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah       | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)                               | Kantor Satpol PP   | 12 Bulan               | 53.600.000         | APBD        |                 | 12 Bulan                          | 54.000.000         |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 02    |    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>            | <b>Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                  |                    | <b>20%</b>             | <b>775.012.500</b> | APBD        |                 |                                   | <b>132.344.450</b> |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 14    |    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)                                  | Kantor Satpol PP   | 1 Kali                 | 20.949.500         | APBD        |                 | 1 Kali                            | 23.044.450         |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 16    |    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kantor Satpol PP   | 1 Tahun                | 54.063.000         | APBD        |                 | 1 Tahun                           | 109.300.000        |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | ..... |    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                      | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)                         | Kantor Satpol PP   | 6 Unit                 | 700.000.000        | APBD        |                 | 0 Unit                            | 0                  |     |

| Kode |    |    |   |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana tahun 2019 |                        |                   |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                   | KET |
|------|----|----|---|----|----|---|---|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----|
|      |    |    |   |    |    |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif    | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Pagu Indikatif    |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 03 |    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>  |                    | <b>20%</b>             | <b>97.100.000</b> | <b>APBD</b> |                 | <b>20%</b>                        | <b>97.900.000</b> |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 03 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)  | Kantor Satpol PP   | 1 Kali Kegiatan        | 72.600.000        | APBD        |                 | 1 Kali Kegiatan                   | 73.000.000        |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu   | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)   | Kantor Satpol PP   | 1 Kali Kegiatan        | 24.500.000        | APBD        |                 | 1 Kali Kegiatan                   | 24.900.000        |     |
|      |    |    |   |    |    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b> |                    | <b>20%</b>             | <b>17.675.200</b> | <b>APBD</b> |                 | <b>20%</b>                        | <b>18.805.600</b> |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 05 |    | 19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)              | Kantor Satpol PP   | 2 Unit                 | 7.070.000         | APBD        |                 | 2 Unit                            | 7.140.000         |     |

| Kode |    |    |   |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                               | Rencana tahun 2019  |                        |                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                    | KET |
|------|----|----|---|----|----|--|--|---|---|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----|
|      |    |    |   |    |    |  |  |   | Lokasi  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Pagu Indikatif     |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 05 | 01 |  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                       | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kantor Satpol PP  | 1 Unit                 | 5.302.600          | APBD        |                 | 1 Unit                            | 5.832.800          |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 05 | 02 |  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                    | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)                      | Kantor Satpol PP  | 1 Unit                 | 5.302.600          | APBD        |                 | 1 Unit                            | 5.832.800          |     |
|      |    |    |   |    |    |  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>    | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>      |   | <b>20%</b>             | <b>171.000.000</b> |             |                 | <b>205</b>                        | <b>171.000.000</b> |     |
|      |    |    |   |    |    |  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                              | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)                   |   | 11 orang               | 171.000.000        | APBD        |                 | 11 orang                          | 171.000.000        |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 10 |    |  | <b>Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah</b>           | <b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>              |   | <b>20%</b>             | <b>283.400.000</b> | <b>APBD</b> |                 | <b>20%</b>                        | <b>284.600.000</b> |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 10 | 01 |  | Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah    | Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah           | 33 Kec  | 96 Kali Kegiatan       | 108.397.600        | APBD        |                 | 96 Kali Kegiatan                  | 108.397.600        |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 10 | 02 |  | Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah       | Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah              | 33 Kec  | 107 Kali Kegiatan      | 147.186.500        | APBD        |                 | 107 Kali Kegiatan                 | 147.186.500        |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 10 | 02 |  | Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah    | Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah           | 33 Kec  | 50 Kali Kegiatan       | 59.623.000         | APBD        |                 | 50 Kali Kegiatan                  | 59.623.000         |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 11 |    |  | <b>Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban</b>       | <b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>            |   | <b>20%</b>             | <b>852.600.000</b> | <b>APBD</b> |                 | <b>20%</b>                        | <b>854.400.000</b> |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 11 | 01 |  | Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban        | 33 Kec  | 48 Giat                | 304.700.000        | APBD        |                 | 48 Giat                           | 305.100.000        |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 11 | 02 |  | Kegiatan Pengamanan Aset                                     | Jumlah Pengamanan Aset  | Lingkungan Kantor, Rumah Dinas Bupati / Wakil Bupati Malang | 365 Hari               | 300.000.000        | APBD        |                 | 365 Hari                          | 301.000.000        |     |



| Kode |    |    |   |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/<br>Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan                               | Rencana tahun 2019 |                        |                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                      | KET              |
|------|----|----|---|----|----|---|--|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
|      |    |    |   |    |    |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Pagu Indikatif       |                  |
|      |    |    |   |    |    | Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum                          | 33 Kec             | 46 Giat                | 247.900.000        | APBD        |                 | 46 Giat                           | 248.300.000          | Mengakumulir PUG |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 12 |    | <b>Program Perlindungan Masyarakat</b>  | <b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>             |                    | <b>3%</b>              | <b>784.489.000</b> | <b>APBD</b> |                 | <b>3%</b>                         | <b>1.580.200.000</b> |                  |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 12 | 01 | Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat                                       | Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas                                  | 33 Kec             | 35 Giat                | 660.873.000        | APBD        |                 | 35 Giat                           | 1.331.200.000        | Mengakumulir PUG |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 12 | 02 | Pembentukan Pengamanan Swakarsa   | Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | 33 Kec             | 12 Giat                | 55.602.000         | APBD        |                 | 12 Giat                           | 112.000.000          |                  |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 12 | 03 | Pembinaan Kelompok Masyarakat   | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat                        | 33 Kec             | 11 Giat                | 68.014.000         | APBD        |                 | 11 Giat                           | 137.000.000          |                  |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 13 |    | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>                    | <b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>          |                    | <b>20%</b>             | <b>770.160.000</b> | <b>APBD</b> |                 | <b>20%</b>                        | <b>1.551.336.000</b> |                  |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 13 | 01 | Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran                                 | Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran  | 33 Kec             | 16 Kali                | 262.066.000        | APBD        |                 | 16 Kali                           | 527.880.000          |                  |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 13 | 02 | Kegiatan Penanggulangan Kebakaran   | Jumlah Penanggulangan Kebakaran                                      | 33 Kec             | 0                      | 147.818.000        | APBD        |                 | 0                                 | 297.750.000          |                  |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 13 | 03 | Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam | Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan                          | 33 Kec             | 24 Kali                | 360.276.000        | APBD        |                 | 24 Kali                           | 725.706.000          |                  |

| Kode |    |    |   |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Rencana tahun 2019 |                        |                    |               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                    | KET |
|------|----|----|---|----|----|---|--|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----|
|      |    |    |   |    |    |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif     | Sumber Dana   |                 | Target Capaian Kinerja            | Pagu Indikatif     |     |
|      |    |    |   |    |    | Kebakaran   | Pemeliharaan Sarpras Damkar  |                    |                        |                    |               |                 |                                   |                    |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 14 |    | <b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>     | <b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b> |                    | <b>20%</b>             | <b>500.000.000</b> | <b>DBHCHT</b> |                 | <b>20%</b>                        | <b>500.000.000</b> |     |
| 1    | 01 | 05 | 2 | 14 | 01 | Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)    | Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai,  | 33 Kec             | 151 Giat               | 500.000.000        | DBHCHT        |                 | 151 Giat                          | 500.000.000        |     |

| Kode          |  |  |  |  |  |  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/<br>Program/Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program/<br>Kegiatan   | Rencana tahun 2019 |  |  |  | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju<br>Rencana Tahun 2020 |                      | KET |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|
|               |  |  |  |  |  |  |  | Dilekati Pita Cukai<br>Yang Bukan<br>Haknya (Salah<br>Personalisasi),Dile<br>kati Pita Cukai<br>Yang Salah<br>Peruntukannya<br>dan Dilekati Pita<br>Cukai Bekas di<br>Peredaran atau<br>Tempat Penjualan<br>Eceran |                    |  |  |  |                    |                                      |                      |     |
| <b>Jumlah</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                    |                                      | <b>6.629.946.050</b> |     |

4.671.788.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tahun 2019 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang tahun 2019 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Malang tahun 2019.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Kepanjen,

2018

BUPATI MALANG

**H. RENDRA KRESNA**